

URGENSI ETIKA POLITIK ISLAM DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN EKSEKUTIF

Idil Anhar Ramli¹, M. Dai Darussalam², Kurniati³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar

¹10200122064@uin-alauddin.ac.id, ²10200122055@uin-alauddin.ac.id, ³kurniati@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT; *The development of the times makes politics increasingly uncontrollable and prone to directing people to bad things. Therefore, there is a need for an order of ethical values as a guide in state life. This article was created to examine the principles of Islamic political ethics which are based on the Al-Qur'an and hadith. This research highlights the correlation of these values with the government system in Indonesia and their implementation in the practice of administering executive institutions. Through literature analysis, it was found that the integrity of Islamic political ethics, which is essentially relevant to the values of Pancasila as the ideology of the Indonesian nation, can increase public trust through accountability, supervision and transparency. This article argues that the application of Islamic political ethics is crucial to strengthening the legitimacy and stability of government in a religious country like Indonesia.*

Keywords: *Islamic Political Ethics, Executive, Government.*

ABSTRAK; Perkembangan zaman membuat politik semakin bias tak terkendali dan rentan mengarahkan manusia kepada hal-hal buruk. Oleh karena itu perlu suatu tatanan nilai etika sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Artikel ini dibuat untuk mengkaji prinsip-prinsip etika politik islam yang disandarkan kepada Al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini menyoroti korelasi nilai-nilai tersebut dengan sistem pemerintahan di Indonesia dan implementasinya dalam praktik penyelenggaraan lembaga eksekutif. Melalui analisa literatur, ditemukan bahwa integritas etika politik islam yang secara hakikatnya relevan dengan nilai-nilai pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, dapat meningkatkan kepercayaan publik melalui akuntabilitas, pengawasan, dan transparansi. Artikel ini berargumen bahwa penerapan etika politik islam adalah langkah krusial untuk memperkuat legitimasi dan stabilitas pemerintahan di negara beragama seperti Indonesia.

Kata Kunci: Etika Politik Islam, Eksekutif, Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Etika berasal dari Bahasa Yunani kuno yakni *ethos* yang berarti : kebiasaan, adat, watak, akhlak, perasaan, perilaku, sikap, dan cara berpikir. Arti inilah yang kemudian oleh Aristoteles filsuf besar zaman Yunani kuno gunakan untuk menunjukkan filsafat moral. Dari arti etimologi tersebutlah, etika biasa diartikan sebagai ilmu tentang hal hal yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang kebiasaan.¹ Dalam Bahasa Indonesia, Etika didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari apa yang baik dan buruk, serta menyangkut hak dan kewajiban moral. Dalam penggunaannya, etika disama artikan dengan “kesusilaan” yang terbentuk dari Bahasa Sansekerta yakni “su” yang artinya baik, dan “sila” yang artinya norma kehidupan. Secara garis besar, konsep etika semakin berkembang menjadikan etika sebagai nilai-nilai atau norma moral yang digunakan sebagai pegangan bagi individu ataupun komunitas masyarakat dalam mengatur perilaku sehari-hari. Dalam hal ini etika diserupakan artinya dengan sistem nilai. Sistem nilai inilah yang senantiasa menjadi panduan bagi kelompok masyarakat agar tercipta kehidupan sosial yang aman, santun, dan bermartabat.²

Pada akhirnya pemahaman setiap orang terhadap etika rentan berbeda. Beberapa mengartikan etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk, beberapa lagi mengartikan etika sebagai apa yang benar dan yang salah.³ Etika juga biasa diartikan sebagai sekumpulan nilai yang bersangkutan dengan akhlak dan moral. Lebih lanjut, konsep etika akan disandarkan kepada variabel tertentu yang pada akhirnya akan menetapkan norma atau kaidah berisi tuntutan untuk tidak melakukan sesuatu. Dari sekumpulan norma tersebutlah akan tercipta etika moral, etika akhlak keagamaan, etika tradisi suku dan adat istiadat, kode etik, dan sebagainya. Etika menjadi hal yang menjadi landasan bertindak terutama dalam konteks berpolitik. Politik berasal dari kata “*politic*” merujuk pada sifat pribadi atau perbuatan. Politik ialah segala aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan, dan yang bermaksud mempengaruhi dengan cara mengubah ataupun mempertahankan suatu sistem tatanan masyarakat. Konsep politik tidak hanya terbatas untuk memandang dari sudut perilaku saja tetapi juga memandang aspek sejarah bangsa Indonesia yang memiliki konsep lebih luas jika ditinjau sejak masa sebelum kemerdekaan hingga sesudah kemerdekaan. Politik juga tidak

¹ MUH. IN'AMUZZAHIDIN, 'Etika Politik Dalam Islam', *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2.2 (2015), 89 <<https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.382>>.

² Rukiyati, Andriani Purwastuti, and Haryatmoko, *Etika Pendidikan*, 2018, EDISI I.

³ Mulyo Wiharto, 'Etika', *Forum Ilmiah Indonusa*, 4.3 (2014), 197–202.

terbatas pada suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan publik, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan sistem dan struktur sosial masyarakat seperti ketika terjadi pergeseran kekuatan politik antara suatu rezim ke rezim yang lainnya.⁴

Substansial dari politik ialah bagaimana kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lain sesuai dengan yang diinginkan. Melalui sudut pandang ini, di letakkanlah politik di posisi yang selalu bersinggungan dengan cara atau upaya untuk memperluas, merebut, membangun, dan mempertahankan kekuasaan. Dikarenakan eratnya kausalitas antara politik dan konflik perlu untuk menerapkan suatu sistem nilai-nilai etika agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan.⁵ Dalam konteks penyelenggaraan negara, etika politik islam yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan hadis menawarkan pandangan yang unik dalam kehidupan bernegara. Urgensi penerapan etika politik islam dalam penyelenggaraan negara menjadi semakin relevan mengingat banyaknya tantangan yang dihadapkan kepada pemerintahan modern seperti korupsi, dan kesenjangan sosial. Penerapan etika politik islam dapat memberikan kerangka bertindak yang bijak bagi para pejabat eksekutif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Etika politik islam tidak terbatas dalam persoalan hubungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melainkan juga terhadap persoalan hubungan antara individu masyarakat dalam bernegara melalui prinsip-prinsip seperti tauhid, amanah, adil, bijaksana, cerdas, berkompeten, musyawarah, dan toleransi.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplor urgensi penerapan etika politik islam dalam penyelenggaraan negara, serta mengkaji pengimplementasian prinsip-prinsip etika politik islam dalam sistem ketatanegaraan modern. Dengan memahami dan mengintegrasikan etika politik islam dalam kebijakan publik dan pelaksanaan kewenangan oleh lembaga eksekutif, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini. Penelitian ini akan berfokus untuk membahas "Urgensi Etika Politik Islam dalam Penyelenggaraan Lembaga Eksekutif". Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran etika politik islam dalam

⁴ Abdulkadir Nambo and Muhamad Rusdiyanti Puluhuluwa, 'Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)', *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 21.2 (2005), 262–85.

⁵ Leo Agustino, *PENGANTAR ILMU POLITIK*, 2020.

pelaksanaan lembaga kepresidenan, dan kedudukan etika politik islam dalam praktik penyelenggaraan lembaga eksekutif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi perpustakaan dengan mengumpulkan berbagai referensi tentang “Urgensi Etika Politik Islam dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Eksekutif” yang berasal dari jurnal dan buku. Penelitian diawali dengan pengumpulan referensi tentang Etika Politik Islam untuk menyusun poin-poin utama dari setiap konsep yang disampaikan. Untuk metode validasi data, penulis menggunakan teknik triangulasi sebagai cara pemastian bahwa data yang diperoleh dari referensi dapat dikonfirmasi keberadaannya. Selanjutnya data tersebut diverifikasi melalui minimal dua sumber yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Etika Politik Islam

Politik diartikan sebagai kemahiran untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai strategi, taktik, dan manuver yang melibatkan interaksi dengan berbagai aktor dalam masyarakat.⁶ Hal ini mencakup kemampuan memahami segala perihal yang bersangkutan dengan pemerintahan, kekuasaan, proses memerintah, dan bentuk organisasi institusi, lembaga, pemerintahan, atau pemerintahannya yang pada akhirnya bertujuan agar masyarakat bisa hidup bahagia dan sejahtera.⁷ Politik adalah kekuasaan, atau segala hal dalam politik adalah tentang kekuasaan. Politik berbicara tentang siapa yang mendapatkan kekuasaan, kapan mendapatkan kekuasaan, dan bagaimana caranya mendapatkan kekuasaan. Oleh karena itu pergejolan serta ambisi untuk mendapat kekuasaan inilah yang pada akhirnya menimbulkan konflik.⁸ Eratnya kausalitas antara politik dengan konflik inilah

⁶ Syarifuddin, ‘Etika Politik Islam Dalam Pemilu’ (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

⁷ Rudy Hartono, ‘Fungsi Dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat’, *Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta*, 2016 <<http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.03.002>%0Ahttp://www.forda-mof.org/files/Sistem_Agroforestri_di_Kawasan_Karst_Kabupaten_Gunungkudul_Untuk_Pengelolaan_Telaga_Sebagai_Sumber_Air_Berkelanjutan.pdf%0A<https://extension.msstate.edu/sites/default/files/pu>>.

⁸ Sudarno Shobron, ‘Konsep Etika Berpolitik Dalam Kitab Sunan Abu Dawud’, *Jurnal Lektur Keagamaan*, 11.1 (2013), 151–80 <<https://jlka.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/55>>.

yang membuat seorang pemegang kekuasaan eksekutif harus memerhatikan etika dalam menjalankan kekuasaan eksekutif. Posisi etika dalam berpolitik sangat penting dalam membantu dalam pembahasan masalah-masalah ideologi dengan cara yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua pihak yang terlibat. Etika dalam berpolitik memberikan patokan, orientasi, dan norma bagi mereka yang ingin mengevaluasi kualitas tatanan politik dan kehidupan berdasarkan martabat manusia sebagaimana mestinya.⁹ Etika politik adalah tentang kekuasaan dan norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma atau aturan adalah pedoman yang mengarahkan tindakan individu agar sesuai dengan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat. Dalam konteks ini etika politik menyoroti bagaimana kekuasaan diatur oleh norma norma tersebut sehingga menciptakan tatanan yang adil dan harmonis dalam masyarakat.¹⁰

Selanjutnya, etika politik jika ditinjau dari sudut pandang islam tidak terlepas dari Al-Qur'an dan hadis hadir sebagai pedoman dalam menentukan segala urusan. Kedua sumber ini jugalah yang sekaligus menjadi sumber akhlak islamiah. Akhlak adalah standar sistem yang digunakan sebagai penilaian perbuatan zahir dan batin manusia, baik secara individu maupun secara berkelompok. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, manusia terdiri dari roh dan jasad yang keduanya memiliki kekuatan yang sama sama besar. Kebesaran akan kekuatan ini wajib untuk digunakan menolong yang lemah bukan membantu yang salah atau yang sewenang-wenang. Dalam memegang amanah kekuasaan, akhlak menjadi makna yang lebih luas dibandingkan etika. Etika terbatas kepada tingkah laku lahiriyah yang hanya timbul dari dan dalam masyarakat, dan bersifat relatif, sedangkan akhlak berkaitan dengan pikiran dan roh. Akhlak jelas bersandar pada Al-Qur'an dan hadis sehingga ukuran baik buruknya bersifat absolut, dan untuk seluruh zaman, sedangkan etika hanya produk kebudayaan yang muncul dari tiap-tiap masyarakat.

Etika politik islam pada dasarnya berbeda dengan etika politik umum, dikarenakan etika politik islam memiliki sumber yang sakral yakni dari Al-Qur'an dan hadis. Epistemologi akhlak tidak bisa lepas dari metode pemahaman ajaran islam. Dalam konteks

⁹ A Fikri Thia NAUFAL, 'Etika Politik Menurut Mahfud MD Dalam Perspektif Fiqh Siyasa', 2020 <[http://repository.radenintan.ac.id/11038/1/SKRIPSI BAB 1%5C&2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/11038/1/SKRIPSI%20BAB%201%5C&2.pdf)>.

¹⁰ Budi Pramono, 'Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat', *Perspektif Hukum*, 17.1 (2017), 101 <<https://doi.org/10.30649/phj.v17i1.86>>.

penerapannya dalam perpolitikan, etika berpolitik islam yang disandarkan kepada akhlak dengan pengambilan keputusan menggunakan jalur syariat islam dapat menghasilkan keputusan yang bisa diberlakukan secara proporsional.¹¹ Nilai etika berpolitik islam merujuk kepada jalan hidup nabi Muhammad saw yang diimplementasikan ke dalam ranah politik demi kemaslahatan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip utama etika politik islam yang harus dimiliki dalam berperilaku dan bertindak oleh seorang pemimpin dalam menjalankan tugas-tugas eksekutif adalah:¹²

a. Agama Sebagai Landasan Etika Pemimpin

Etika politik dalam islam menjadikan keimanan kepada agama sebagai landasan utama yang kemudian diistilahkan sebagai tauhid. Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa terciptanya manusia di muka bumi ini adalah untuk semata beribadah kepada Allah. Segala perbuatan manusia, apalagi yang dilakukan oleh seorang pemimpin adalah untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tauhid adalah hal yang esensial dalam ajaran islam, dan oleh karena itu tauhid dijadikan sebagai titik besar penegakan utama agama dalam setiap hal-hal yang dikerjakan manusia dalam berpikir maupun dalam bertindak. Pentingnya tauhid bagi seorang pemimpin adalah untuk menimbulkan ketakwaan dalam dirinya. Islam memandang kemuliaan seorang hamba hanya dari variabel ketakwaannya kepada Tuhannya, bukan dari variabel lain. Oleh karena itu agama menjadi hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin, sebab agama bisa dijadikan landasan dalam segala tindakan manusia. Pada intinya, islam dengan konsep tauhid adalah hal yang diperlukan bagi seorang pemegang kekuasaan eksekutif dan para politisi. Agama yang berfungsi sebagai pengendali perbuatan diharapkan mampu mengarahkan pemegang kekuasaan eksekutif tersebut untuk membuat kebijakan dengan baik.

b. Amanah dalam Menjalankan Kekuasaan

Seseorang yang diberikan kekuasaan harus memiliki tanggung jawab atas kekuasaan yang ia pegang. Konsep tanggung jawab dalam islam disebut dengan amanah. Seorang pemimpin yang telah diberikan tanggung jawab kecil maupun besar kepadanya wajib untuk

¹¹ Dewi Dahlan, 'Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Perspektif) Political Ethics in Islam (Construction and Perspective)', *VMenara Ilmu*, 15.01 (2021), 42–50.

¹² Farhah and Achmad Farid, 'PRINSIP ETIKA POLITIK PEMIMPIN DALAM ISLAM', *Dauliyah*, 4.2 (2019), 66–84.

menjalankan amanah dan kewajibannya untuk melaksanakan kewajiban sebagai pemimpin dan memberikan hak-hak yang layak kepada yang dipimpinnya. Amanah juga bisa diartikan sebagai orang yang dapat dipercaya, dan orang yang dapat dipercaya haruslah memiliki perilaku yang jujur. Oleh karena itu seorang pemegang kekuasaan eksekutif haruslah orang yang amanah dalam menjalankan tugasnya. Amanah yang diemban oleh seorang pemimpin harus dijalankan sesuai dengan kewajibannya agar proses pelaksanaan tugas-tugas eksekutif senantiasa berpegang kepada kemaslahatan bersama. Islam memandang kekuasaan sebagai amanah, dan karena itulah islam secara tegas melarang para pemegang kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip ini bisa dijadikan pondasi moralitas yang kuat untuk penyelenggaraan lembaga eksekutif yang berkomitmen untuk melenyapkan kezaliman, kejahatan, dan keserakahan penguasa.¹³

c. Adil dan Bijaksana dalam Penegakan Hukum

Hukum-hukum yang berkembang dewasa ini berbasis logika rasional yang kemudian dikonstruksi oleh manusia sendiri rentan menuju kepada hedonisme dan kekufuran yang ujungnya dapat membawa manusia kepada kekafiran. Hukum hanya dijadikan sebagai alat legitimasi formil yang semakin lama semakin jauh dari nilai agama sehingga perlu kiranya unruk memperhatikan hukum islam dalam kehidupan bernegara. Bagi umat islam, hukum islam sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis adalah pedoman hidup yang luhur bagi umat manusia untuk mencapai kebijaksanaan hidup.¹⁴ Berlandaskan kepada syariaah islam, para pemikir muslim meletakkan prinsip keadilan dan kebijaksanaan sebagai hal yang urgen untuk dimiliki seorang pemimpin pada masa sekarang. Kebijaksanaan seorang pemimpin mampu memunculkan kewibawaan sehingga masyarakat yang dipimpin akan segan kepadanya. Keadilan oleh seorang pemimpin akan menghadirkan rasa nyaman dan kepercayaan masyarakat. Prinsip keadilan dalam etika politik islam adalah upaya manusia untuk berpikir dan bertindak dengan bijaksana agar tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang bijaksana pula. Dengan demikian, penguasa eksekutif yang berpegang

¹³ 'Etika Politik Islam', *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, 1.1 (2016), 1–38.

¹⁴ Yogi Prasetyo, 'Adab Sebagai Politik Hukum Islam', *Tsaqafah*, 13.1 (2017), 93
<<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.978>>.

pada prinsip keadilan dan kebijaksanaan adalah hal yang penting demi terwujudnya masyarakat yang adil dan maju.¹⁵

d. Cerdas dan Berkompetensi

Islam tidak sembarangan menetapkan aturan untuk seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki etika kecerdasan dalam menjalankan kekuasaannya. Jika sebuah negara dipimpin oleh penguasa yang tidak cerdas dan berkompeten, maka perlahan negara yang dipimpin tidak akan berkembang dan hancur. Nabi Muhammad saw menekankan bahwa kompetensi serta kecerdasan adalah hal yang wajib dimiliki pemimpin, karena dengan kecerdasan dan kompetensi tersebut pemimpin dapat melihat peluang-peluang yang tidak dapat dilihat oleh rakyat biasa. Dengan demikian, seorang pemegang kekuasaan eksekutif haruslah memiliki kecerdasan intelektual, dan keahlian pada bidangnya agar dalam pengambilan keputusan, dan pelaksanaan tugas-tugas eksekutif dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat banyak.

e. Bermusyawarah dan Toleransi

Islam memberi posisi istimewa tentang musyawarah, baik dalam skala kecil atau dalam lingkungan keluarga hingga dalam skala besar atau dalam kehidupan bernegara. Kegiatan musyawarah adalah hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh umat muslim dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Musyawarah adalah pengambilan keputusan dengan melibatkan beberapa pihak sehingga dengan sendirinya mengurangi potensi ketegangan sosial. Karena masing-masing ide, inovasi, dan kepentingan diharmonisasikan bersama dalam musyawarah maka musyawarah bisa menjadi penuntun manusia untuk bisa meningkatkan taraf hidup.¹⁶ Toleransi sendiri diartikan sebagai diberikannya kebebasan kepada sesama manusia atau kepada warga negara untuk menjalankan kehidupannya untuk menentukan nasib masing-masing, selama dalam menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syariat agar tercipta ketertiban dan perdamaian dalam

¹⁵ Ashari Sakti Alim, Salmawati Salmawati, and Dian Eka Rahmawati, 'Etika Politik Terhadap Perilaku Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus DPRD Kota Malang)', *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7.1 (2021), 30–43 <<https://doi.org/10.33506/jn.v7i1.1392>>.

¹⁶ Dudung Abdullah, 'Musyawarah Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3.2 (2014), 242–53 <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1509>.

masyarakat. Dalam mempraktekkan toleransi islam memiliki batasan yakni hanya dibenarkan hanya untuk hal-hal yang bersifat sosial, seperti pada bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan ekonomi. Untuk hal-hal akidah seperti salat, syahadat dan sebagainya, islam tidak memberikan toleransi sama sekali.¹⁷ Musyawarah dan toleransi berperan penting dalam menjalankan kekuasaan eksekutif, karena pelaksanaan musyawarah dan toleransi menghidupkan inklusivitas dalam kehidupan sosial masyarakat, sekaligus menjadi penjamin agar kebijakan eksekutif berlandas kepada keadilan dan etika demi pelaksanaan negara yang baik. Agama dan negara memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Bersandar pada syariat islam, prinsip etika yang ditemukan baik secara eksplisit maupun implisit ini menggambarkan pengaruh islam dalam kehidupan sosial agar tercipta masyarakat adil makmur. Serangkaian prinsip-prinsip etika politik islam ini mengandung elemen keluhuran yang juga menjadi identitas bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. Sudah seharusnya pemerintah memerhatikan prinsip-prinsip etika politik islam dalam menjalankan kekuasaan agar bangsa kita tidak mengalami fenomena krisis etika dalam berpolitik.¹⁸

2. Implementasi Konsep Etika Politik Islam dalam Pelaksanaan Kekuasaan Eksekutif

Fenomena sosial politik pada zaman Nabi Muhammad SAW ditandai dengan lahirnya Piagam Madinah atau shahifat atau mistaq al-madinah. Piagam madinah hadir sebagai tonggak awal konstitusi, dan disebut sebagai konstitusi paling modern pada masanya.¹⁹ Piagam Madinah mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, meskipun pada masa itu konsep pembagian kekuasaan belum dikenal. Namun pada prakteknya beliau sudah menjalankan konsep tersebut dengan mendelegasikan kepada para sahabat yang dinilai cakap untuk menjalankan

¹⁷ Zulham Zulham and Khairuddin Lubis, 'Islam Dan Toleransi', *ANSIRU PAI : Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 6.2 (2022), 116 <<https://doi.org/10.30821/ansiru.v6i2.14649>>.

¹⁸ Ari Darmastuti, 'Etika Politik : Teori Dan Praktek Dalam Masyarakat Indonesia', *Teropong Aspirasi Politik Islam*, 1.1 (2005), 1–11.

¹⁹ Hamsah Hasan, Marilang Marilang, and Kurniati Kurniati, 'Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam', *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 14.2 (2021), 122–36 <<https://doi.org/10.35905/kur.v14i2.2076>>.

tugas-tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.²⁰ Islam memberi penekanan kepada lembaga-lembaga negara untuk menjalankan kekuasaan sesuai dengan amanah. Sebaliknya rakyat wajib taat kepada para pemegang kekuasaan sepanjang pemegang kekuasaan tersebut masih menaati konstitusi atau dalam fikih siyasah disebut dusturi. Dalam fikih siyasah dikenali tiga kekuasaan yakni:

- a. al-sulthah al-tanfidziyyah, yang berwenang untuk menjalankan proses pemerintahan (eksekutif),
- b. al-sulthah al-tasyri'iyyah, yang berwenang dalam pembuatan undang-undang (legislatif),
- c. al-sulthah al-qadha'iyyah, yang berwenang dalam wilayah peradilan (yudikatif).²¹

Indonesia sendiri dalam menjalankan pemerintahannya menganut konsep trias politika yang dikembangkan oleh Montesquieu. Trias politika adalah konsep pembagian kekuasaan dalam suatu negara dengan pemetaan kekuasaan yang terdiri dari:

- a. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang,
- b. Kekuasaan eksekutif sebagai yang melaksanakan undang-undang,
- c. Kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan pengadilan.

Montesquieu memberi penekanan ajaran trias politika pada kedaulatan negara yang dilandaskan hukum. Dengan demikian trias politika oleh Montesquieu akan lebih mudah dipahami dari sudut pandang hukum, karena atas dasar hukumlah lahir konsep ini.²² Konsep trias politika ini adalah pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan. Hal ini dikarenakan, bahwa secara esensial kekuasaan tidak bisa dipisahkan dan harus saling berhubungan. Masa modern membawa perkembangan ketatanegaraan memberikan wajah baru terkhusus pada wilayah kekuasaan eksekutif. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, badan eksekutif difasilitasi oleh ahli dan fasilitas lengkap di setiap kementerian. Kelengkapan fasilitas oleh badan eksekutif yang tidak seimbang dengan yang ada pada badan-badan legislatif maupun yudikatif ini mengakibatkan ruang kekuasaan eksekutif semakin lama

²⁰ Suparto, 'Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam', *Hukum Islam*, 19.1 (2019), 134 <<https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044>>.

²¹ 'Hubungan Lembaga Legislatif Dengan Eksekutif Perspektif Muhammad Asad', 2021.

²² Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, 2020.

semakin melebar hingga memasuki wilayah legislatif dan yudikatif. Kekuasaan yang luas itu dapat ditinjau dari beberapa bidang:

- a. Militer; Pengaturan angkatan bersenjata,
- b. Yudikatif; Memberi grasi, amnesti, dan lain-lain,
- c. Diplomatik; Hubungan diplomatik luar negeri,
- d. Administratif; Pelaksanaan undang-undang dan penyelenggaraan administrasi negara,
- e. Legislatif; Perencanaan undang-undang dan keterkaitan dalam pembentukan undang-undang bersama lembaga legislatif.²³

Tidak bisa dipungkiri bahwa sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia memberikan kekuasaan yang sangat luas bagi presiden untuk melaksanakan tugas-tugas eksekutif. Kekuasaan yang luas tersebut diberikan langsung oleh konstitusi sehingga hanya konstitusi jugalah yang dapat melakukan pembatasan atas kekuasaan tersebut. Melalui kacamata ketatanegaraan, luasnya kekuasaan eksekutif ini tidak bisa dipandang sepele karena dapat dengan mudah membawa kepada penyalahgunaan kekuasaan.²⁴ Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa suatu sistem politik atau sistem pemerintahan pada dasarnya mempunyai nilai-nilai etika politik fundamental yang bersumber pada ideologi negara yang kemudian digunakan sebagai standarisasi untuk mengevaluasi sistem yang sedang berjalan. Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandung kerangka filosofis berperilaku seluruh masyarakat Indonesia, sehingga nilai-nilai pancasila perlu digunakan sebagai standar etika pelaksanaan kekuasaan eksekutif.²⁵ Dalam praktik penyelenggaraannya, pancasila mengkehendaki nilai-nilai dasar ajaran butir pancasila sebagai langkah-langkah strategis bagi tujuan yang dicita-citakan bersama. Kandungan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan adalah lima nilai pembentuk perilaku manusia yang digunakan untuk semua aspek kehidupan tak terkecuali dalam konteks pelaksanaan

²³ Rahman Mulyawan, *SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA*, UNPAD Press, 2015.

²⁴ Hendra Wahanu Prabandani, 'Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits Of The Presidential Executive Power)', *Biro Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 1.1 (2015), 1–27.

²⁵ Ibnu Hamdan Muzakki, 'Pancasila Sebagai Sistem Etika Dalam Mengimplementasikan Moderasi Beragama Di Indonesia', *FICOSIS*, 3.1 (2023), 389–99.

kekuasaan eksekutif yang sangat kompleks.²⁶ Kandungan nilai filosofis pancasila tersebut adalah:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Segala urusan kehidupan sudah ditata dan disusun secara kompleks oleh agama. Pada prinsipnya ketika seseorang sudah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentulah akan patuh dan taat terhadap perintah Nya. Artinya ketika seseorang sudah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentulah akan memiliki pondasi etik keagamaan dalam dirinya.

b. Kemanusiaan

Yakni etika yang menjaga dan meninggikan peletakan harkat manusia. Etika kemanusiaan tidak membenarkan perilaku rasisme dan diskriminasi.

c. Kesatuan Nasional

Sebagaimana slogan Bhinneka Tunggal Ika, sejuta perbedaan yang ada di Indonesia harusnya dijadikan sebagai cara untuk saling mengenal satu sama lain untuk memperkuat rasa kesatuan yang ada. dengan berlandaskan etika persatuan, tindakan pemecah belah bangsa dan provokasi tidaklah dibenarkan.

d. Demokrasi

Etika demokrasi ialah etika persaudaraan sebagai sesama manusia yang memiliki hak yang sama akan kebebasan dan kemerdekaan. Ketika etika yang satu ini sudah dimiliki, maka secara otomatis akan terjauh dari sikap-sikap otoriterian.

e. Keadilan Sosial

Dalam hal ini, dinamika etika keadilan sosial merujuk kepada semangat mau bekerja. Etika dalam bentuk ini memberikan hal baik hanya kepada mereka yang mau dan giat bekerja.²⁷

Nilai-nilai filosofis yang terkandung pada setiap butir pancasila ini cukup untuk menjadi pedoman etik dalam melaksanakan kekuasaan eksekutif. Akan tetapi, yang perlu

²⁶ Hartati; Firmansyah Putra, 'Etika Politik Dalam Politik Hukum Di Indonesia (Pancasila Sebagai Sistem Etika)', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fisipol Universitas Jambi*, 2.Etika Politik dalam Politik Hukum di Indonesia (2019).

²⁷ Abdul Rasid, 'Konseptualisasi Etika Dalam Politik Perspektif Komunikasi Islami', *UIN SGD Bandung*, 5.2 (2011), 625–56.

diingat adalah pembentukan pancasila itu sendiri tidak terlepas dari pengaruh kuat tokoh-tokoh islam pada masa pembentukan pancasila seperti KH. Wahid Hasyim dan tokoh besar lainnya. Kedalaman nilai filosofis etika yang terkandung dalam pancasila sejatinya merupakan perwujudan dari nilai-nilai ajaran islam yang disesuaikan.²⁸ Pada intinya, pelaksanaan kekuasaan eksekutif haruslah disandarkan kepada pancasila sebagai ideologi negara yang mengandung nilai-nilai filosofis pedoman etika politik yang relevan dengan ajaran islam. Penulis berpendapat bahwa etika politik dalam islam semestinya senantiasa ditempatkan sebagai instrumen yang mengarahkan pemegang kekuasaan eksekutif dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang bernilai kepedulian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta kondisi harmonis sosial antara aktor politik dengan seluruh masyarakat demi kehidupan yang adil makmur sebagaimana cita-cita negara.

3. Tantangan Implementasi Etika Politik Islam

Politik berisi pertarungan antar beberapa kekuatan besar yang memperjuangkan kepentingan masing-masing. Jika melihat perjalanan bangsa, sudah banyak peristiwa-peristiwa politik tragis yang mendampingi sejarah politik di Indonesia, misalnya pertarungan kepentingan yang terjadi pada peristiwa G30S PKI, kerusuhan dan penjarahan pada Mei 1998, konflik dan kekerasan pada tragedi Sampit, dan tragedi Poso. Semua itu meninggalkan trauma psikologis dan penderitaan panjang. Pertarungan politik yang keras menjadikan konsep etika politik islam terkesan utopis dalam implementasi.²⁹ Dinamika perpolitikan di Indonesia yang dimainkan oleh aktor-aktor politik lokal maupun nasional seringkali berisi intrik-intrik politik yang menimbulkan kekacauan politik di Indonesia. Seringnya terjadi kegaduhan menggambarkan bagaimana kualitas diri dari para aktor perpolitikan tanah air. Hendaknya setiap aktor politik yang berkontes harus memiliki kapabilitas terutama dalam perbuatan dan etika. Aktor politik yang memiliki etika yang baik tentu akan menjadikan dunia perpolitikan di Indonesia menjadi wadah politik yang berkualitas. Etika politik tidak hanya sebatas cara seseorang berperilaku sehari-hari, namun juga tentang bagaimana dia menjalankan kekuasaan. Para politisi seyogianya berperilaku baik, dapat dipercaya, dan

²⁸ M Saifullah Rohman, 'Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Pancasila', *Millah*, 13.1 (2013), 205–15
<<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,40159-lang,id-c,kolom-t,Pancasi>>.

²⁹ IN'AMUZZAHIDIN.

bertanggung jawab karena baik buruknya kondisi sosial masyarakat sangat bergantung kepada keputusan politik pemerintah.³⁰

Al-Farabi mengemukakan konsep negara ideal yang menitik beratkan kepada kepala negara yang didudukkan sebagai kekuasaan yang paling luas dalam penyelenggaraan negara. Dibandingkan dengan cabang kekuasaan lain, kekuasaan eksekutif dalam hal ini kepala negara adalah yang paling berperan dalam misi pembangunan negara Indonesia.³¹ Kekuasaan eksekutif di Indonesia dijabat oleh seorang presiden yang dalam menjalankan tugas-tugas eksekutif dibantu oleh kementerian. Seorang presiden dalam menjalankan tanggung jawabnya tidak bisa berjalan seorang diri karena kewenangan dan tugas yang sangat luas.³² Penjelasan tentang kekuasaan eksekutif yang melebar ini telah dijelaskan lebih lanjut pada sub pembahasan sebelumnya. Ali Syari'ati mengemukakan pendapat bahwa peran negara dan pemerintah bukan hanya terbatas pada urusan administrasi, melainkan juga menyangkut tentang peran-peran etis dalam membangun kehidupan berbangsa yang mengedepankan moral.³³ Merespon kekuasaan eksekutif yang terlalu luas ini, perlu kiranya untuk seorang pelaksana eksekutif untuk berpegang pada ajaran-ajaran islam sebagai penuntun hdiup manusia. Faktanya, pelaksanaan politik di Indonesia belum sesuai dengan prinsip etika politik islam. Masih banyak masyarakat yang merasakan ketidakadilan. Pejabat-pejabat dalam kekuasaan eksekutif banyak yang terjerat dalam kasus-kasus korupsi, pencucian uang, dan sejumlah kasus besar lainnya yang menjadi cerminan bahwa pejabat-pejabat eksekutif masih jauh pada prinsip-prinsip etika politik islam.³⁴ Dalam penerepan etika politik islam banyak hal yang menjadi faktor-faktor penghambat. Faktor penghambat ini terdiri dari faktor internal dan eksternal.

³⁰ Aldy dwi mulyana, 'Etika Politik Islam Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak', *REPOSITORI IAIN KUDUS*, 2.30 (2013), 1–17.

³¹ Riski Lia Sapitri, 'KONSEP NEGARA IDEAL MENURUT PEMIKIRAN AL-FARABI DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBANGUNAN NEGARA-BANGSA INDONESIA', 2019 <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/01/2019.01.23_PLAN-NACIONAL-DE-CANCER_web.pdf>.

³² M. Sidi Ritaudin, 'Kekuasaan Negara Dan Kekuasaan Pemerintahan Menurut Pandangan Politik Ikwanul Muslimin', *Jurnal TAPIS*, 12.1 (2016).

³³ Sugiyono, 'Konsep Etika Politik Dalam Perspektif Ali Syari'ati', *Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah*, 2009.

³⁴ Hisny Fajrussalam and others, 'Pelaksanaan Politik Di Indonesia Berdasarkan Ajaran Dan Nilai Dasar Politik Islam', *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11.1 (2022), 91 <<https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2553>>.

a. Faktor Internal

Faktor internal yang menjadi penghambat penerapan konsep etika politik islam dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dimulai dari sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia kurang memerhatikan pembelajaran etik dan moral. Standar pendidikan yang selama ini menitikberatkan pada pelajaran-pelajaran konvensional seperti IPA, IPS, matematika, dan bahasa yang kemudian membentuk sistem kurikulum yang monoton melahirkan pemikiran-pemikiran yang materialistis dan apatis.³⁵

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud adalah intensnya pengaruh budaya modern yang secara perlahan menghilangkan jati diri bangsa. Hal yang tidak bisa dimunafikkan adalah bahwa secara umum etika politik masyarakat Indonesia dipengaruhi etika politik selain etika politik islam seperti etika politik yunani kuno, etika politik eropa, dan tradisionalisme sinkretisme jawa yang tentunya memiliki prinsip khas masing-masing. Faktor ini akan menimbulkan ambiguitas dalam penerapan etika politik islam di Indonesia.³⁶

Dibalik segala tantangan pelaksanaannya, etika politik islam tetaplah bersifat penting untuk diterapkan, terkhusus pada penyelenggaraan lembaga eksekutif. Apabila prinsip-prinsip etika politik islam tidak ditegakkan oleh penyelenggara lembaga eksekutif, maka akan terjadi keterpurukan etika dan moral pemimpin sebagai berikut:

- a) Keterpurukan etika dan moral pemimpin karena korupsi. Pemimpin yang gila akan harta, rentan untuk tidak mempertimbangkan halal dan haramnya sumber uang. Krisis moral sudah menjadi penyakit pejabat bangsa Indonesia yang menjangkit sejak dulu. Tingginya angka kasus korupsi dari tahun ke tahun menjadi bukti moral bangsa yang kurang baik
- b) Keterpurukan etika dan moral pemimpin karena kurang pemahaman terhadap ajaran agama. Agama menjadi pedoman tingkah laku seluruh urusan manusia. Oleh karena itu kurangnya pemahaman agama akan membuat pemimpin kehilangan etika dan moralnya.

³⁵ Fathiyah, 'Penerapan Pancasila Sebagai Sistem Etika Bangsa Indonesia', *Jurnal Prahaiswara*, 1.1 (2021), 127–36 <<https://prajaiswara.jambiprov.go.id>>.

³⁶ Sri Sudarsih, 'Nilai Kesederhanaan Dan Nilai Kedisiplinan Sebagai Landasan Kehidupan Masyarakat Jepang', *Kiryoku*, 1.3 (2017), 50.

- c) Keterpurukan etika dan moral oleh pemimpin yang sombong. Ketika yang menjadi pemimpin adalah orang yang sombong, maka pemimpin tersebut hanya akan memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Sikap sombong oleh pemimpin akan membuat seorang pemimpin tersebut tidak akan mempedulikan nilai nilai etika dan moral.
- d) Keterpurukan etika dan moral karena kurangnya tanggung jawab. Islam meletakkan kekuasaan sebagai sebuah tanggung jawab, maka berat hal ini jika dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Banyak orang-orang yang ketika sudah menjadi penguasa, akan dengan gampangnya bertindak semena-mena tanpa mempertimbangkan pertanggung jawaban atas apa yang dilakukannya kepada rakyat yang dipimpinnya maupun pertanggung jawabannya di akhirat nanti.
- e) Keterpurukan etika dan moral karena tidak jujur. Tanpa sikap jujur, keutamaan nilai-nilai moral lainnya akan hilang. Seorang pemimpin tanpa sikap jujur akan mengarahkan segala tindakannya kepada kejahatan dan kemunafikan sehingga akan membuat nilai-nilai moral dan etika tidak ada artinya lagi.³⁷

Untuk mengatasi tantangan sulitnya penerapan etika politik islam dalam pelaksanaan lembaga eksekutif, penulis menawarkan strategi:

- a) Pembinaan etika politik islam. Perlu kiranya untuk menyediakan penidikan nilai-nilai etika politik islam bagi pejabat eksekutif. Peran ulama dan cendikiawan muslim juga diperlukan dalam proses ini agar pejabat eksekutif dapat menjalankan tugas-tugas eksekutif beradsarkan ajaran islam.
- b) Penguatan sistem pengawasan. Peran lembaga pengawas internal maupun eksternal eksekutif diharapkan mampu menata lembaga eksekutif agar senantiasa sejalan dengan akuntabilitas. Dalam implementasinya, lembaga pengawas harusnya memberikan sanksi yang tegas kepada pejabat pelanggar etika politik islam. Lembaga pengawas harus menjadi penjamin lembaga eksekutif agar dapat sejalan dengan prinsip-prinsip etika politik islam sebagaimana yang diharapkan.

³⁷ M.Thahir Maloko, 'Etika Politik Dalam Islam', *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2.2 (2016), 89 <<https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.382>>.

- c) Integritas dalam membuat kebijakan publik. Integritas pejabat eksekutif adalah pemastian bahwa kebijakan publik yang dibuat oleh penguasa eksekutif harus sejalan dengan prinsip etika politik islam. Dalam membuat kebijakan, pemerintah harus melakukan sosialisasi kebijakan publik dan memanfaatkan media massa sebagai sarana penyebaran nilai-nilai etika politik islam oleh pejabat eksekutif.

KESIMPULAN

Perkembangan zaman merubah tatanan kehidupan manusia menjadi semakin kompleks menjadikan etika politik islam memiliki peran krusial, karena berisi landasan moral normatif bagi penyelenggara lembaga eksekutif. Prinsip-prinsip seperti peletakan agama sebagai landasan etika, amanah dalam menjalankan kekuasaan, adil dan bijaksana dalam penegakan hukum, cerdas dan berkompeten, dan bermusyawarah dan toleran menuntun para pemimpin untuk bertindak demi kebaikan rakyat agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan.

Etika politik islam sangat relavan dengan indonesia sebagai negara hukum. Etika politik islam nyatanya sangat relevan dengan pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia. Nilai-nilai filosofis etika yang terkandung dalam setiap butir pancasila hendaknya dijadikan sebagai pedoman etik dalam penyelenggaraan tugas-tugas eksekutif.

Dinamika perpolitikan tanah air yang selalu berdampingan dengan konflik berdampak pada implementasi etika politik islam yang seringkali dihadapkan beberapa tantangan baik dari faktor internal seperti pendidikan etika yang tidak jelas dan minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan eksekutif, maupun dari faktor eksternal karena pluralnya adat kebiasaan dan pengaruh budaya etika yang beragam. Untuk menghadapi tantangan ini, solusi yang dihadirkan adalah dengan melakukan pembinaan etika politik islam bagi pejabat eksekutif, penguatan sistem pengawasan, dan penegakan integritas dalam pembuatan kebijakan publik. Prinsip-prinsip etika politik islam jika diterapkan dengan baik, dapat menuntun bangsa Indonesia menuju negara maju yang adil makmur sebagaimana amanat konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dudung, 'Musyawarah Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3.2 (2014), 242–53
<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1509>

Agustino, Leo, *PENGANTAR ILMU POLITIK*, 2020

Aldy dwi mulyana, 'Etika Politik Islam Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak', *REPOSITORI IAIN KUDUS*, 2.30 (2013), 1–17

Alim, Ashari Sakti, Salmawati Salmawati, and Dian Eka Rahmawati, 'Etika Politik Terhadap Perilaku Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus DPRD Kota Malang)', *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7.1 (2021), 30–43 <<https://doi.org/10.33506/jn.v7i1.1392>>

Dahlan, Dewi, 'Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Perspektif) Political Ethics in Islam (Construction and Perspective)', *VMenara Ilmu*, 15.01 (2021), 42–50

Darmastuti, Ari, 'Etika Politik : Teori Dan Praktek Dalam Masyarakat Indonesia', *Teropong Aspirasi Politik Islam*, 1.1 (2005), 1–11

'Etika Politik Islam', *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, 1.1 (2016), 1–38

Fajrussalam, Hisny, Muthia Nur Azhar, Ninda Washilatul Hasanah, Shafa Nurul Aulia, and Zidan Ahmad Farhan, 'Pelaksanaan Politik Di Indonesia Berdasarkan Ajaran Dan Nilai Dasar Politik Islam', *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11.1 (2022), 91 <<https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2553>>

Farid, Farhah and Achmad, 'PRINSIP ETIKA POLITIK PEMIMPIN DALAM ISLAM', *Dauliyah*, 4.2 (2019), 66–84

Fathiyah, 'Penerapan Pancasila Sebagai Sistem Etika Bangsa Indonesia', *Jurnal Prahaiswara*, 1.1 (2021), 127–36 <<https://prajaiswara.jambiprov.go.id>>

Hartati; Firmansyah Putra, 'Etika Politik Dalam Politik Hukum Di Indonesia (Pancasila Sebagai Sistem Etika)', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fisipol Universitas Jambi*, 2.Etika Politik dalam Politik Hukum di Indonesia (2019)

Hartono, Rudy, 'Fungsi Dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat', *Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta*, 2016 <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.03.002%0Ahttp://www.fordamof.org/files/Sistem_Agroforestri_di_Kawasan_Karst_Kabupaten_Gunungkudul_Un>

tuk_Pengelolaan_Telaga_Sebagai_Sumber_Air_Berkelanjutan.pdf%0Ahttps://extension.msstate.edu/sites/default/files/pu>

Hasan, Hamsah, Marilang Marilang, and Kurniati Kurniati, 'Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam', *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 14.2 (2021), 122–36 <<https://doi.org/10.35905/kur.v14i2.2076>>

'Hubungan Lembaga Legislatif Dengan Eksekutif Perspektif Muhammad Asad', 2021

Huda, Nurul, *Hukum Lembaga Negara*, 2020

IN'AMUZZAHIDIN, MUH., 'Etika Politik Dalam Islam', *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2.2 (2015), 89 <<https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.382>>

Maloko, M.Thahir, 'Etika Politik Dalam Islam', *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2.2 (2016), 89 <<https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.382>>

Mulyawan, Rahman, *SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA*, UNPAD Press, 2015

Muzakki, Ibnu Hamdan, 'Pancasila Sebagai Sistem Etika Dalam Mengimplementasikan Moderasi Beragama Di Indonesia', *FICOSIS*, 3.1 (2023), 389–99

Nambo, Abdulkadir, and Muhamad Rusdiyanti Puluhuluwa, 'Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)', *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 21.2 (2005), 262–85

NAUFAL, A Fikri Thia, 'Etika Politik Menurut Mahfud MD Dalam Perspektif Fiqh Siyasah', 2020 <http://repository.radenintan.ac.id/11038/1/SKRIPSI_BAB_1%5C&2.pdf>

Prabandani, Hendra Wahanu, 'Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits Of The Presidential Executive Power)', *Biro Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 1.1 (2015), 1–27

Pramono, Budi, 'Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat', *Perspektif Hukum*, 17.1 (2017), 101 <<https://doi.org/10.30649/phj.v17i1.86>>

- Prasetyo, Yogi, 'Adab Sebagai Politik Hukum Islam', *Tsaqafah*, 13.1 (2017), 93
<<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.978>>
- Rasid, Abdul, 'Konseptualisasi Etika Dalam Politik Perspektif Komunikasi Islami', *UIN SGD Bandung*, 5.2 (2011), 625–56
- Ritaudin, M. Sidi, 'Kekuasaan Negara Dan Kekuasaan Pemerintahan Menurut Pandangan Politik Ikwanul Muslimin', *Jurnal TAPIs*, 12.1 (2016)
- Rohman, M Saifullah, 'Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Pancasila', *Millah*, 13.1 (2013), 205–15 <<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,40159-lang,id-c,kolom-t,Pancasi>>
- Rukiyati, Andriani Purwastuti, and Haryatmoko, *Etika Pendidikan*, 2018, Edisi I
- Sapitri, Riski Lia, 'KONSEP NEGARA IDEAL MENURUT PEMIKIRAN AL-FARABI DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBANGUNAN NEGARA-BANGSA INDONESIA', 2019 <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/01/2019.01.23_PLAN-NACIONAL-DE-CANCER_web.pdf>
- Shobron, Sudarno, 'Konsep Etika Berpolitik Dalam Kitab Sunan Abu Dawud', *Jurnal Lektur Keagamaan*, 11.1 (2013), 151–80
<<https://jlka.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/55>>
- Sudarsih, Sri, 'Nilai Kesederhanaan Dan Nilai Kedisiplinan Sebagai Landasan Kehidupan Masyarakat Jepang', *Kiryoku*, 1.3 (2017), 50
- Sugiyono, 'Konsep Etika Politik Dalam Perspektif Ali Syari'ati', *Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah*, 2009
- Suparto, 'Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam', *Hukum Islam*, 19.1 (2019), 134 <<https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044>>
- Syarifuddin, 'Etika Politik Islam Dalam Pemilu' (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)
- Wiharto, Mulyo, 'Etika', *Forum Ilmiah Indonusa*, 4.3 (2014), 197–202

Zulham, Zulham, and Khairuddin Lubis, 'Islam Dan Toleransi', *ANSIRU PAI : Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 6.2 (2022), 116
<<https://doi.org/10.30821/ansiru.v6i2.14649>>